

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, F. N., Retnowati, A., & Wibawani, S. (2023). Pendampingan Masyarakat Melalui Perizinan Legalitas Usaha Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 1793–1800.
- Al-Hamdi, R., Sakir, S., Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). *Penelitian Kualitatif: Pegangan mahasiswa ilmu pemerintahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alamsyah, A. (2013). *Teori-teori Administrasi Publik dalam Konteks Kekinian*. Makassar: Alauddin University Press.
- Arikunto, S. (2016). *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (8th ed.). PT Asdi Mahasatya.
- Atmosudirjo, P. (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia. (2021). *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia.
- Barber, M. P. (1974). *Public Administration*. London: Macdonald & Evans.
- Basheka, B. C. (2012). The Paradigms of Public Administration Re-Examined: A Reflection. *Journal of Public Administration*, 47(1), 25–67. <https://doi.org/10.10520/EJC121371>
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Bupati Cilacap. (2021). *Peraturan Bupati Cilacap Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilaca*. Cilacap: Pemerintah Daerah Cilacap.
- Bupati Cilacap. (2023). *Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah*. Cilacap:

Pemerintah Daerah Cilacap.

- Cheema, C. G., & Rondinelli, D. (1983). *Decentralization and Development, Policy Implementation in Development Countries*. London: Sage.
- Cilacap, P. D. K. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten*. Cilacap: Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.
- Das, P. (2017). Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in India: Opportunities, Issues and Challenges. *Great Lakes Herald*, 11(1), 77–86. Retrieved from <https://www.greatlakes.edu.in/herald/pdfs/march-2017/article-5.pdf>
- Fadhilah, A. N., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk. *Publika*, 8(3), 911–924. <https://doi.org/10.26740/publika.v7n4.p%25p>
- Fajar, Y. (2024). Adisatrya Dampangi Pelaku UMKM, Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Berusaha. Retrieved May 17, 2025, from <https://radarbanyumas.disway.id/read/115681/adisatrya-dampangi-pelaku-umkm-fasilitas-pembuatan-nomor-induk-berusaha>
- Faustina, R., & Rusli, B. (2025). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online Di DPMPTSP Kota Cirebon. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 29–41. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i1.61157>
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 790–807. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38703>
- Fitriani, Y. (2023). *Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha UMKM Melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Oleh Dpmpstsp Kota Padang (Studi Pada Perizinan Berusaha Kafe Kopi Di Kota Padang)*. Padang: Universitas Andalas.

- Ginting, A. H., Bahroni, R., & Rumbekwan, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis OSS RBA Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71–85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Gunarti, K. B. (2024). UMKM Cilacap Pahami Kewajiban Ber-NPWP. Retrieved May 18, 2025, from <https://www.pajak.go.id/index.php/id/berita/umkm-cilacap-pahami-kewajiban-ber-npwp>
- Hanim, L., Maryanto, M., Djunaedi, H. D. H., & Wahyono, H. D. (2020). Pemahaman Warga Sembungharjo terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Membangun Desa-UNS*, 1(1), 349–356. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/aktivita/article/view/59603>
- Henry, N. (1989). *Administrasi Negara dan Masalah Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Rajawali.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studing Public Policy: Policy Cycle and Policy Subsystem*. Canada: Oxford University Press.
- Ikeanyibe, O. M., Eze Ori, O., & Okoye, A. E. (2017). Governance Paradigm in Public Administration and The Dilemma of National Question in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 3(1), 1316916. <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1316916>
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Islamy, M. I. (2014). Kebijakan Publik. In *Definisi dan Makna Kebijakan Publik* (pp. 1–41). Jakarta: Universitas Terbuka.

- Jones, C. O. (1996). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi Offset.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kemendagri RI. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*. Jakarta: Kemendagri RI.
- Kemendagri RI. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kemendagri RI.
- Kemendagri RI. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah*. Jakarta: Kemendagri RI.
- Kismartini, & Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Kismartini, & Bungin, B. (2019). *Wilayah Pesisir Indonesia: Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kismartini, & Yusuf, I. M. (2023). *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kusnadi, I. H., Nuraida, N., & Furqoni, W. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 3(1), 69–83. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v3i1.1080>
- Miles, M. B. A., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications, Inc.
- Millani, A. I., Libragiantar, E. D., Putra, D. M., Roofif, A. B., & Asmyndar, R. F. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pentingnya NIB untuk UMKM Kelurahan Gunung Anyar secara Door To Door. *Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara*, 2(2), 38–47. <https://doi.org/10.58374/jmmn.v2i2.147>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Offset.

- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha*. Cilacap: Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.
- Pemerintah RI. (2008). *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2020). *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Pemerintah R.
- Presiden RI. (2014). *Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: Sah Media.

- Revida, E., Hidayatulloh, A. N., Soetijono, I. K., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, M. I., ... Asmarianti. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Robbins, S. P. (1993). *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Applications*. New Jersey: Prentice Hall.
- Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(2), 51–57. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i2.98>
- Rosidah, D. (2024). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Komunikasi, Sosial, Dan Ilmu Politik*, 1(4), 234–248. Retrieved from <https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/2811>
- Safaah, E., & Damayanti, K. I. (2022). Pendampingan Legalitas Berusaha Berbasis Resiko Untuk Bantuan Permodalan Usaha Mikro Masyarakat Kelurahan Ciwaduk. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 4(2), 135–139. <https://doi.org/10.31092/kuat.v4i2.1809>
- Safitri, D., Hendrayady, A., & Poti, J. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach” (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 102–118. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.340>
- Setianingrum, R. D. (2025). Belum Semua Pelaku Usaha di Kabupaten Cilacap Punya NIB. Retrieved May 18, 2025, from <https://radarbanyumas.disway.id/read/115391/belum-semua-pelaku-usaha-di-kabupaten-cilacap-punya-nib>
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission Di Kecamatan Suruh. *Prapanca: Jurnal Abdimas*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.37826/prapanca.v2i1.229>

- Simmons, G., Armstrong, G. A., & Durkin, M. G. (2008). A Conceptualization of the Determinants of Small Business Website Adoption: Setting the Research Agenda. *International Small Business Journal*, 26(3), 351–389. <https://doi.org/10.1177/026624260808874>
- Simon, H. A. (1993). Strategy and Organizational Evolution. *Strategic Management Journal*, 14(2), 131–142. <https://doi.org/10.1002/smj.4250141011>
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suntoro, Irawan, & Hariri, H. (2018). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Suwarsono, S. (2016). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Taufiq, W. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tinolah, R. S. (2016). *Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan: Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Tobing, R. M. L., Bengkel, B., & Irmayani, T. (2023). The Impact from the Implementation of Online Single Submission (OSS) towards the Ease of Business Licensing for Business Actors in North Sumatera Province. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA)*, 3(6), 627–638. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v3i6.1546>

- Trismawati. (2024). Penerapan Sistem OSS Bagi Para Pelaku Usaha di Kabupaten Cilacap. Retrieved May 18, 2025, from <https://dpmptsp.cilacapkab.go.id/v2/penerapan-sistem-oss-bagi-para-pelaku-usaha-di-kabupaten-cilacap/>
- Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha Pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 351–368. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.115>
- Utomo, S. T. W., Sunyata, L., & Patriani, I. (2024). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Online Di Dinas Pmkukmptsp Kabupaten Mempawah. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 104–115. <https://doi.org/10.62099/khapro.v5i2.87>
- Wahab, S. A. (2002). *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Zulkifli, H., Hafni, N., Muklir, Bakar, M. B. A., & Akmal, M. (2022). Policy Implementation of System Online Single Submission Risk Based Approach in Banda Aceh. *Proceedings Of International Conference On Social Science, Political Science, and Humanities (Icospolhum)*, 3–6. <https://doi.org/10.29103/icospolhum.v3i.65>